

Laporan Keuangan Wajar dengan Pengecualian

KETAPANG. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar yang diserahkan pada 30 Juni 2011, bahwa laporan keuangan Kabupaten Ketapang dinyatakan atau opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"Hal ini berarti secara umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran Tahun 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal, yang material sesuai

standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan," ungkap Andi Djamiruddin, Sekda Ketapang mewakili Bupati dalam paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2010, kemarin.

Dalam paripurna tersebut, disampaikan gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2010.

Berkaitan dengan pendapatan, realisasi pendapatan daerah tahun 2010 senilai 831.587.665.525,95 persen atau 102,20 persen dari target pendapatan.

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010 sebesar Rp 30.758.210.652,58 atau 93 persen.

Untuk dana perimbangan ta-

hun anggaran 2010, lanjut Andi, senilai Rp 735.093.215.025,00 atau 102,32 persen dari target yang telah ditentukan.

Dikatakan Andi berkaitan dengan bidang belanja, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2010 senilai Rp 835.849.702.467,00 atau 94,57 persen dari rencana belanja yang ditetapkan.

"Realisasi belaja daerah tahun anggaran 2010 terdiri dari belanja tidak langsung dan belaja langsung," kata dia.

Sementara itu, untuk penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2010 senilai Rp 74.830.224,33 dan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp 4.861.982.000,00

Dijelaskan Andi, berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan maka sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010 senilai Rp 65.706.104.303,28. (KiA)